

STRUKTUR DOKUMEN EVALUASI RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TAHUN 2023 - 2026



**Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Dinas Sosial**

**Jl. Jend. Sudirman No. 73 (Komplek Perkantoran) Marabahan, 70513
Telp/fax (0511) 4799222**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya **Rencana Strategi (RENSTRA)** Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) ini memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Dinas Sosial Barito Kuala selama 5 (lima) tahun mendatang yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi Dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Barito Kuala.

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) ini.

Marabahan, 18 April 2023

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Barito Kuala



H. FUAD SYEKH, S.Sos, M.AP

NIP. 197010221991011001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tujuan Evaluasi	2
1.4 Metodologi Evaluasi	3
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah	5
2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	5
2.1.1 Pengukuran Kinerja.....	8
2.1.2 SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	9
2.1.3 SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	11
2.1.4 SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial.....	13
2.2 Evaluasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	14
2.3 Evaluasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	20
BAB III Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja	22
3.1 Faktor Pendorong	22
3.1.1 SASARAN STRATEGIS 2 (Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))	22
3.1.2 SASARAN STRATEGIS 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial)	24
3.2 Faktor Penghambat	24
3.2.1 SASARAN STRATEGIS 1 (Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	25
BAB IV Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Antara Renstra PD, Renja PD dan APBD.....	26
4.1 Renstra PD sebagai Dokumen Perencanaan	26
4.2 APBD sebagai Alat Pelaksana	26
4.3. Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub-kegiatan.....	26
4.4 Manfaat Konsistensi	27
BAB V Penutup.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55

5.2 Saran	56
------------------------	-----------

LAMPIRAN

Critical Success Factor (CSF) Perangkat Daerah*

Cascading dan Crocutting*

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Predikat Nilai Capaian Kinerja	5
Tabel	2.2.	Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai	5
Tabel	2.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2024	6
Tabel	2.4.	Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial(PPKS) yang mandiri Tahun 2024	7
Tabel	2.5.	Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Kategori Tahun 2024	7
Tabel	2.6.	Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Kategori Tahun 2024	8
Tabel	2.7.	Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala	8
Tabel	2.8	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Tahun 2024	10
Tabel	2.9	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	10
Tabel	2.10	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Terhadap Target Tahun 2024	11
Tabel	2.11	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mampu Berusaha Tahun 2024	12
Tabel	2.12	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	12
Tabel	2.13	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	13
Tabel	2.14	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Dinsos Tahun 2024	14
Tabel	2.15	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Dinsos Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	14
Tabel	2.16	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Dinsos Terhadap Target Tahun 2024	14
Tabel	2.17	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala	16
Tabel	2.18	Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	21

Tabel	4.1	MATRIK KESELARASAN SASARAN DAN INDIKATOR KEPALA DINAS SOSIAL	31
Tabel	4.2	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra 2023 – 2026 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala	32
Tabel	4.3	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja 2026 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala	36
Tabel	4.4	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian tujuan suatu organisasi yang dikelola secara modern hanya dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Perencanaan menurut dimensi waktu dapat dikelompokkan ke dalam perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah perlu disusun untuk dipedomani dalam menyusun perencanaan jangka pendek.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Rencana pembangunan daerah berupa Dokumen Rencana Strategis (Renstra) disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala menyusun serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen dinas dalam rangka pencapaian tujuan, yang tentunya merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 didasari dari Visi dan Misi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2005-2025 (sesuai Peraturan Daerah No.03 Tahun 2012) dalam **Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026**.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Inmendagri 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026;

1.3 . Tujuan Evaluasi

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman serta mendayagunakan seluruh potensi yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam menjawab tuntutan perkembangan permasalahan dan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu ;

2. Mempermudah pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala baik secara internal maupun eksternal; dan
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 adalah:

- 1) Agar dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan.
- 2) Agar dapat memberikan layanan prima dalam usaha kesejahteraan sosial dengan melibatkan seluruh pelaku (*stakeholder*) penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

1.4 . Metodologi Evaluasi

Dinas Sosial dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2023.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Nomor : 460/038/DISSOS tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, telah ditetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) indikator Sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator
Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	1 indikator
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	1 indikator

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan Evaluasi
- 1.4 Metodologi Evaluasi
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah

- 2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2 Evaluasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 2.3 Evaluasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB III Faktor Pendorong dan Penghambat Capaian Kinerja

- 3.1 Faktor Pendorong
- 3.2 Faktor Penghambat

BAB IV Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Antara Renstra PD, Renja PD dan APBD

BAB V Penutup

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

LAMPIRAN

Critical Success Factor (CSF) Perangkat Daerah*

Cascading dan Croscutting*

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Nomor: 050/040/DISSOS, tanggal 02 Januari 2024 tentang Perubahan Pertama Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 yang semula 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama menjadi 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama.

Predikat kriteria capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Berdasarkan Tabel 2.1 Nilai Capaian Kinerja untuk persentase < 100 mendapatkan predikat Tidak tercapai, untuk persentase = 100 mendapatkan predikat Tercapai / Sesuai target, sedangkan untuk persentase > 100 maka predikat nilai capaian kinerjanya yaitu melebihi target.

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

Berdasarkan Tabel 2.1 Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang tidak tercapai, dikategorikan kedalam 5 penilaian yaitu, sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : NOMOR 460/038/DISSOS tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026. Adapun hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Formulasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	Jumlah PPKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar/Jumlah PPKS di Kab. Batola dikalikan seratus	69,02	92,71	134,32
2	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	Persen	Jumlah PPKS) Yang Mampu Berusaha / Jumlah PPKS) Yang Menjadi Sasaran Berusaha dikalikan seratus	1,31	0,67	51,14
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	Persen	Nilai SAKIP	71.86	71.91	100,06
TOTAL					47,39	55,09	95,17

Dari Tabel 2.2 di atas dapat diuraikan bahwa pada tahun 2024, capaian kinerja untuk indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” sebesar 92,71%. Dalam hal ini lebih besar dari yang ditargetkan yakni 69,02%, yang berarti program yang bertujuan untuk Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah dilaksanakan dengan baik.

Untuk Capaian Indikator Kinerja Utama ”Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” sebesar 0,67%. Dalam hal ini menunjukkan angka dibawah target yaitu sebesar 1,31%.

Dan untuk capaian Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” pada tahun 2024 sebesar 71,91. Dalam hal ini menunjukkan angka diatas target yaitu 71,86.

Tabel 2.4
Capaian IKU Dinas Sosial
Berdasarkan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) yang mandiri Tahun 2024

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	2

Berdasarkan Tabel 2.4 dijelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu Pertama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” dengan capaian 134,32% dikategorikan >100% sehingga dikategorikan Melebihi Target, Kedua Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha dengan capaian 51,14% dikategori <100 sehingga dikategorikan Tidak Tercapai. dan ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dengan capaian 100,06% sehingga dikategorikan Melebihi Target.

Tabel 2.5
Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Kategori
Tahun 2024

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	1

Berdasarkan tabel 2.5 didapatkan 2 (dua) indikator dengan kategori sangat baik karena persentase capaian lebih dari 90 % dan 1 (satu) indikator dengan kategori kurang dengan persentase di atas 50%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Kategori
Tahun 2024

No	IKU	Formulasi	Target	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PPKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar/Jumlah PPKS di Kab. Batola dikalikan seratus	69,02	134,32	Sangat Baik
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	Jumlah PPKS) Yang Mampu Berusaha / Jumlah PPKS) Yang Menjadi Sasaran Berusaha dikalikan seratus	1,31	51,14	Kurang
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP	71.86	100,06	Sangat Baik
TOTAL			47,39	96,22	Sangat Baik

2.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Nomor : 460/038/DISSOS tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, telah ditetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) indikator Sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator
Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	1 indikator

	Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	1 indikator

2.1.2 SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” tersebut ditetapkan dengan indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” dengan formulasi perhitungannya indikator sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS di Kab. Batola}} \times 100$$

Berdasarkan DTKS pada tahun 2024 diketahui bahwa jenis PPKS di Kabupaten Barito Kuala terdapat 14 jenis yaitu sebanyak 16.218 KK, dan pada tahun 2024 PPKS yang telah diberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 15.036 PPKS, dengan demikian capaian realisasi kinerja =

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS di Kab. Batola}} \times 100 =$$

$$\frac{15.036 \text{ KK}}{16.218 \text{ KK}} \times 100 = 92,71\%$$

Capaian Kinerja atas Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 untuk indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” ditetapkan target sebesar 69,02% (11.193 PPKS) dari jumlah seluruh PPKS 16.218 PPKS. Tahun 2024 tersebut PPKS yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 92,71 %, (15.036 PPKS) dengan demikian capaian kinerja indikator kinerja ”Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” adalah 134,32 % (92,71% / 69,02% x 100 = 134,32 %).

Tabel 2.8
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	69,02	92,71	134,32

Berdasarkan Tabel 2.8 Capaian kinerja “Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya “ tahun 2023 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 telah **tercapai** dan bahkan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam PK (mencapai 134,32 %).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2.9
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	66,97	92,71

Dari table 2.9 dapat dilihat bahwa realisasi “Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” mengalami peningkatan 25,74 % dibanding dengan tahun sebelumnya (2023).

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Dalam Renstra.

Realisasi kinerja indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 94,88 %. Dan berdasarkan dokumen Renstra untuk indikator ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” di tahun 2024 telah ditetapkan 68,48 %

Tabel 2.10
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya
Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Target RENSTR A (2024)	Persentase Capaian s/d 2024 terhadap Renstra
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	69,02	92,71	68,48	135,38

Berdasarkan tabel 2.10 diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2024 telah mencapai 134,32 %.

2.1.3 SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” tersebut ditetapkan dengan indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” dengan formulasi perhitungan indikator sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang mampu berusaha}}{\text{Jumlah 3 jenis PPKS di Kab. Batola}} \times 100$$

Berdasarkan DTKS pada tahun 2024 dikabupaten Barito Kuala diketahui bahwa jumlah 3(tiga) jenis PPKS yaitu :

- a. Fakir Miskin = 14.978
- b. Anak Terlantar = 52
- c. dan Penyandang Disabilitas = 687

Jumlah = 15.717 KK

Sampai dengan tahun 2024 jumlah PPKS yang telah diberi bantuan sehingga mampu berusaha sendiri (mandiri) berusaha sebanyak 106 KK. Sehingga realisasi kinerja untuk indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha :

$$= \frac{\text{Jumlah PPKS yang mampu berusaha}}{\text{Jumlah 3 jenis PPKS di Kab. Batola}} \times 100$$

$$= \frac{106 \text{ KK}}{15.717 \text{ KK}} \times 100 = 0,67 \%$$

Capaian Kinerja atas Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 untuk indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” ditetapkan target sebesar 1,31% (212 KK) dari jumlah 3 jenis PPKS sebesar 15.717 KK.

Tahun 2024 tersebut PPKS yang mampu berusaha sebesar 0,67 %, (106 KK) dengan demikian capaian kinerja indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” adalah 0,67 % (0,67%/1,31% X 100 = 0,67%).

Tabel 2.11
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mampu Berusaha
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	Persen	1,31	0,67	51,14

Berdasarkan Tabel 2.11 Capaian kinerja “Indikator Kinerja Utama “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha “ tahun 2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 hanya mencapai (51,14%).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2.12
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha Tahun
2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	Persen	1	0,73

Dari table 2.12 dapat dilihat bahwa realisasi “Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” mengalami penurunan sebesar 0,27 % dibanding dengan tahun sebelumnya (2023).

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Dalam Renstra.

Realisasi kinerja indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 0,67 %.

Dan berdasarkan dokumen Renstra untuk indikator ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” di tahun 2024 telah ditetapkan 1,31 %

Tabel 2.13
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya

Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Target RENSTRA (2024)	Persentase Capaian s/d 2024 terhadap Renstra
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	1,31	0,67	1,31	51,14

Berdasarkan tabel 2.13 diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2024 tidak tercapai (hanya 0,67 %) dari target dalam Renstra.

2.1.4 SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” tersebut ditetapkan dengan indikator “Nilai SAKIP Dinsos” dengan formulasi perhitungan indikator sebagai berikut :

$$\text{Nilai SAKIP Dinsos} = \frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos}} \times 100$$

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Nomor 700/78/IP/2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala tanggal 08 Juli 2024, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial menunjukkan nilai sebesar **71,91** dengan predikat “**BB**”, dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos tahun 2024 = 71,91

Target Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos = 71,86

Maka realisasi kinerja indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos}} \times 100 =$$

$$\frac{71,91}{71,86} \times 100 = 100,06 \%$$

Capaian Kinerja atas Indikator Nilai SAKIP Dinsos dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 untuk indikator kinerja ” Nilai SAKIP Dinsos” ditetapkan target sebesar 71,86 dari Nilai SAKIP Dinsos.

Tahun 2024 tersebut Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos sebesar 71,91 dengan demikian capaian kinerja indikator kinerja ” Nilai SAKIP Dinsos” adalah 100,06% (realisasi/target x 100 = 71,91 / 71,86 x 100 = 100,06 %)

Tabel 2.14
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Nilai SAKIP Dinsos Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP Dinsos	Nilai	71,86	71,91	100,06

Berdasarkan Tabel 2.14 Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama “Nilai SAKIP Dinsos” tahun 2023 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024 telah **tercapai** dan melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam PK (100,06%).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai SAKIP Dinsos tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2.15
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai SAKIP Dinsos Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2023	2024
Nilai SAKIP Dinsos	Nilai	71,86	71,91

Dari table 2.15 dapat dilihat bahwa realisasi “Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Dinsos” mengalami peningkatan sebesar 0,05 % dibanding dengan tahun sebelumnya (2023).

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Dalam Renstra.

Realisasi kinerja indikator “Nilai SAKIP Dinsos” sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 100,06 %.

Dan berdasarkan dokumen Renstra untuk indikator ” Nilai SAKIP Dinsos” di tahun 2024 telah ditetapkan 71,95 %

Tabel 2.16
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Dinsos Terhadap Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Target RENSTR A (2024)	Persentase Capaian s/d 2024 terhadap Renstra
Nilai SAKIP Dinsos	71,86	71,91	71,95	100,06

Berdasarkan tabel 2.16 diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2024 telah mencapai 100,06 %.

2.2 Evaluasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 4 (empat) tahun kedepan dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala setiap tahunnya.

Tabel 2.17

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

Kode Perangkat Daerah : 1.06.0.00.0.00.01.0000

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Menurunkan Tingkat Kemiskinan																
Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)																
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													
				Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha, keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	100 Persen	100 Persen	294.605.006,00	100 Persen	180.000.270,00	100 Persen	217.800.327,00	100 Persen	239.580.360,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota													
				Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif, Persentase pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	100 Persen	100 Persen	188.742.906,00	100 Persen	216.654.702,00	100 Persen	238.300.372,00	100 Persen	249.810.189,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, penyanggah disabilitas dan penyanggah penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri	252 Persen	100 Persen	71.090.540,00	100 Persen	147.490.753,00	100 Persen	178.463.809,00	100 Persen	196.310.189,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial													
				Persentase penyanggah penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang terlayani	100 Persen	100 Persen	1.400.000,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persen	100 Persen	71.090.540,00	100 Persen	0,00	100 Persen	2.493.628.170,00	100 Persen	0,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
				Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase penyanggah disabilitas yang mandiri	212 Orang	212 Orang	79.135.350,00	216 Orang	98.990.331,00	217 Orang	108.889.364,00	218 Orang	119.778.300,00	218 Orang	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid	9316 Persen	100 Persen	1.031.922.226,00	100 Persen	618.999.860,00	100 Persen	748.989.831,00	100 Persen	823.888.814,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
				Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha	105 Keluarga	105 Keluarga	294.605.006,00	115 Keluarga	198.000.297,00	145 Keluarga	217.800.327,00	155 Keluarga	239.580.360,00	155 Keluarga	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
				Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	8995 KK	8995 KK	310.135.430,00	8871 KK	401.499.863,00	8747 KK	441.649.849,00	8623 KK	485.814.834,00	8623 KK	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
				Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	65 Persen	100 Persen	114.828.563,00	100 Persen	494.999.729,00	100 Persen	598.949.671,00	100 Persen	658.844.638,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota													
				Persentase Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid.	17 Kecamatan	17 Kecamatan	427.181.790,00	17 Kecamatan	279.399.984,00	17 Kecamatan	307.339.982,00	17 Kecamatan	338.073.980,00	17 Kecamatan	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
				Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat.	200 Orang	200 Orang	114.828.563,00	200 Orang	544.499.701,00	200 Orang	598.949.671,00	200 Orang	658.844.638,00	200 Orang	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah																	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
			Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	61,37 Persen	66,37 Persen	463.040.532,00	71,37 Persen	2.244.732.542,00	76,37 Persen	590.133.051,00	81,37 Persen	649.146.351,00	81,37 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA			
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	77.634.325,00	100 Persen	68.697.623,00	100 Persen	75.567.385,00	100 Persen	83.124.123,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA			
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
			Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	13.487.250,00	100 Persen	82.472.500,00	100 Persen	90.719.750,00	100 Persen	99.791.725,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA			
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
			Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	218.294.473,00	100 Persen	179.188.592,00	100 Persen	197.107.450,00	100 Persen	216.818.192,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA			
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	77.566.834,00	100 Persen	87.879.000,00	100 Persen	96.666.900,00	100 Persen	106.333.590,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA			
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	76.057.650,00	100 Persen	115.246.879,00	100 Persen	130.071.566,00	100 Persen	143.078.722,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
				Laporan Keuangan Sesuai SAP	1 Dokumen	1 Dokumen	2.810.931.734,00	1 Dokumen	2.900.205.680,00	1 Dokumen	5.638.570.328,00	1 Dokumen	6.202.427.360,00	1 Dokumen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
				Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu, Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	100 Persen	2.810.931.734,00	100 Persen	5.125.973.026,00	100 Persen	5.638.570.328,00	100 Persen	6.202.427.360,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	

2.3 Evaluasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026 melalui Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Mengingat eratnya kaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dengan pencapaian Visi dan Misi yang ada, maka harus disusun untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala seperti tercantum dalam target kinerja RPD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam pencapaian Misi, Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala harus mampu berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 3, yaitu : Meningkatkan kualitas ketaqwaan, kecerdasan Kesehatan, dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangka usaha	8.281	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	7.831
2	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2368	100%	100%	100%	100%	2.238
3	Persentase penyandang Disabilitas yang Mandiri	2759	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	2.734

4	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	100%	100%	100%	100%	0
5	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10540	100%	100%	100%	100%	1.306
6	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Validasi	105.590	20%	20%	20%	20%	100%
7	Persentase peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan preventif terhadap penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	0	100%	100%	100%	100%	150
8	Persentase peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan preventif terhadap kekerasan pada anak	0	100%	100%	100%	100%	0
9	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	0	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif	261	100%	100%	100%	100%	261

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA

3.1 Faktor Pendorong

3.1.1 SASARAN STRATEGIS 1 (Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))

Penyebab Keberhasilan terhadap Sasaran Strategis 1 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu :

- Perencanaan dan Penganggaran yang telah disesuaikan dengan kaidah yang berlaku.
- Dukungan dan kordinasi yang efektif antara Pekerja Ahli Sosial dan Relawan Sosial.
- Dukungan Alat Transportasi untuk menunjang kegiatan.
- Adanya Komitmen dan kerjasama yang baik antara Pelaksana kegiatan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Tersedianya data yang valid dan terpenuhinya persyaratan secara administrasi.

Monitoring dan evaluasi yang terus dilakukan sebagai upaya menjamin pelaksanaan dan keberhasilan kegiatan.

3.1.1 SASARAN STRATEGIS 2 (Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 terhadap 3 jenis PPKS dikabupaten Barito Kuala antara lain :

- a. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 363 / KUM / 2024 Tanggal 16 Agustus 2024 tentang Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) Tahun 2024. Bantuan diberikan kepada 3 Orang yaitu yang beralamat di desa Sungai Telan Besar Rt. 005 an. Bahriansyah, di desa Sungai Telan Besar Rt. 010 an. Ikas dan di desa Sungai Telan Besar Rt 010 an. Mahyudi. Adapun bantuan yang diserahkan untuk mendukung Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-) berupa 60 Ekor Ayam Buras Dara, 3 Buah Lampu Pijar, 9 Buah Tempat Minum Ayam, 3 Buah Kandang, 9 Buah Tempat Makan Ayam, 1 Set

Vitamin, dan 3 zak Pakan berdasarkan Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45 / 363 / KUM / 2024 Tanggal 16 Agustus 2024.

- b. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 456 / KUM /2024 Tanggal 18 Nopember 2024 tentang Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE) Tahun 2024. Terdapat 3 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu Kube “Mandiri Bersama” diketuai Ahmad Busairi di Desa Anjir Muara Kota Kec. Anjir Muara, Kube “Hidayah” diketuai Aliyah di Desa Anjir Serapat Muara Kota Tengah Kec. Anjir Muara, Kube “Warga Membangun” diketuai Bariyah di Desa Sepakat Bersama Kec. Anjir Muara diketuai oleh Bariyah. Barang yang diserahkan berupa Tenda dan Perlengkapannya, rincian berdasarkan Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 456 / KUM /2024 Tanggal 18 Nopember 2024
- c. Keputusan Bupati Barito Kuala nomor : 188.45 / 427 / KUM / 2024 Tentang Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Berupa Peralatan Rumah Tangga dan Sembako untuk Penerima Bedah Rumah Bagi Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024. Bantuan Sosial Peralatan Rumah Tangga dan Sembako untuk Bedah Rumah Bagi Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala diberikan kepada 8 orang kepala keluarga yang berdomisili di Kec. Tabukan 2 Orang, Kec. Bakumpai 4 Orang dan Kec. Belawang 2 Orang. Bantuan yang diberikan sebanyak 33 item berupa peralatan rumah tangga dan sembako dengan rincian berdasarkan Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/427/KUM/2024 Tanggal 17 Oktober 2024.
- d. Keputusan Bupati Barito Kuala nomor : 100.3.3.2 / 426 / KUM / 2024 Tentang Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Sembako Untuk Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024. Bantuan Sosial Sembako Untuk Penerima Bantuan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana diberikan kepada 40 orang kepala keluarga yang berdomisili di Kec. Mandastana 24 Orang, Kec. Alalak 16 Orang. Bantuan yang diberikan sebanyak 8 item berupa peralatan rumah tangga dan sembako dengan rincian berdasarkan Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 426 / KUM / 2024 Tanggal 17 Oktober 2024

Upaya yang akan dilakukan di tahun berikutnya (tahun 2025) untuk tercapainya indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” :

- Memaksimalkan penggunaan data PPKS oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan membuat payung hukumnya agar menjadi satu data yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Perlunya Komitmen dan dukungan anggaran yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat terlayani dengan baik.

3.1.2 SASARAN STRATEGIS 3 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial)

Keberhasilan pencapaian target indikator Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial didukung oleh Kerjasama yang baik dengan bidang teknis, pemenuhan terhadap dokumen perencanaan dan melaksanakan perbaikan-perbaikan sesuai arahan.

Upaya yang akan dilakukan di tahun berikutnya (tahun 2025) untuk tercapainya indikator kinerja ” Nilai SAKIP Dinsos” :

- a. Meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial adalah dengan memperkuat sinergitas perencanaan, anggaran dan pelaksanaan serta memperkuat kerjasama lintas sektor dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial.

3.2 Faktor Penghambat

3.2.1 SASARAN STRATEGIS 1 (Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah: “Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal dan Belum Optimalnya Nilai SAKIP Dinas sosial, yang diiringi dengan:

1. Ketersediaan *database* PPKS yang terus mengalami perbaikan/verifikasi.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan PPKS yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah dihilir, sementara akar masalah ini tingkat hulu tidak

banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PPKS memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi dengan dukungan yang terbatas, tentu sulit bagi Dinas Sosial dan Dinas terkait lain di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.

4. Sinergitas dan sinkronisasi program/anggaran yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
5. Perumusan strategi perlindungan dan pemberian jaminan sosial yang terintegrasi dengan program lain berkaitan dengan penanganan masalah sosial di daerah.
6. Ancaman bencana alam banjir dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
7. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkelanjutan.
8. Kurang optimalnya penanganan, perawatan dan kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PPKS itu sendiri.

3.2.1 SASARAN STRATEGIS 2 (Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))

Adapun Penyebab Kegagalan terhadap capaian kinerja yaitu :

- Belum maksimalnya penggunaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Kabupaten/Kota sehingga penanganan PPKS masih belum merata.
- Faktor internal seperti kurangnya tenaga yang focus mengelola usaha dan faktor eksternal dari persaingan pasar

Kurangnya dukungan anggaran terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada pengiriman Penyandang Disabilitas ke Solo dalam rangka Peningkatan Keterampilan Berusaha.

BAB IV

KONSISTENSI PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN ANTARA RENSTRA PD, RENJA PD DAN APBD

Konsistensi program, kegiatan, dan sub-kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah (PD) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Renstra PD harus menjadi dasar bagi APBD, dengan program dan kegiatan yang tercantum di Renstra PD menjadi dasar alokasi anggaran dalam APBD.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang konsistensi tersebut:

4.1 Renstra PD sebagai Dokumen Perencanaan:

- Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh sebuah perangkat daerah (SKPD).
- Renstra PD berfungsi sebagai panduan bagi SKPD dalam mencapai tujuan jangka panjang dan menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis.
- Renstra PD harus berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan memuat indikator kinerja yang terukur.

4.2. APBD sebagai Alat Pelaksana:

- APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah dokumen keuangan yang memuat rincian pendapatan dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran.
- APBD harus didasarkan pada Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang dialokasikan anggaran dalam APBD harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD.
- Dengan demikian, APBD menjadi alat pelaksana dari Renstra PD, yang memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

4.3. Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub-kegiatan:

- **Konsistensi Program:**

Program yang tercantum dalam Renstra PD harus menjadi dasar bagi pembentukan program-program di APBD. Program-program di APBD harus selaras dengan program-program di Renstra PD.

- **Konsistensi Kegiatan:**

Kegiatan yang tercantum dalam Renstra PD harus menjadi dasar bagi kegiatan-kegiatan yang dialokasikan anggaran dalam APBD. Kegiatan-kegiatan di APBD harus selaras dengan kegiatan-kegiatan di Renstra PD.

- **Konsistensi Sub-kegiatan:**

Sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra PD harus menjadi dasar bagi sub-kegiatan yang dialokasikan anggaran dalam APBD. Sub-kegiatan di APBD harus selaras dengan sub-kegiatan di Renstra PD.

4.4 Manfaat Konsistensi:

- **Pencapaian Tujuan:**

Konsistensi Renstra PD dan APBD akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan lebih baik.

- **Pengendalian Anggaran:**

Konsistensi Renstra PD dan APBD akan mempermudah pengendalian anggaran, sehingga anggaran dapat dialokasikan secara efektif dan efisien.

- **Evaluasi Kinerja:**

Konsistensi Renstra PD dan APBD akan mempermudah evaluasi kinerja, sehingga dapat diketahui sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1
MATRIK KESELARASAN SASARAN DAN INDIKATOR
KEPALA DINAS SOSIAL

No.	DOKUMEN RENSTRA		DOKUMEN IKU		DOKUMEN PK 2025		LAPORAN KINERJA 2025		KETERANGAN
	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	
1	Meningkatnya Pemanfaatan Kebutuhan Dasar Pemerl u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerl u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Meningkatnya Pemanfaatan Kebutuhan Dasar Pemerl u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerl u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Meningkatnya Pemanfaatan Kebutuhan Dasar Pemerl u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerl u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Meningkatnya Pemanfaatan Kebutuhan Dasar Pemerl u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerl u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Sasaran dan Indikator PK 2025 dan LKjIP 2025 <i>telah sesuai</i> dengan Renstra dan SK penempatan IKU
2	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerl u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerl u Pelayanan yang mampu berusaha	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerl u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerl u Pelayanan yang mampu berusaha	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerl u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerl u Pelayanan yang mampu berusaha	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerl u Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerl u Pelayanan yang mampu berusaha	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	

Tabel 4.2
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra 2023 – 2026 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

Kode Perangkat Daerah : 1.06.0.00.0.00.01.0000

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Menurunkan Tingkat Kemiskinan																
Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)																
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL													
				Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha, keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan, potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dan pengembangan keselakawanan sosial dan pelestarian nilai kepelawanan yang dikelola	100 Persen	100 Persen	294.605.006,00	100 Persen	180.000.270,00	100 Persen	217.800.327,00	100 Persen	239.580.360,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota													
				Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif, Persentase pelestarian nilai kepelawanan yang dikelola	100 Persen	100 Persen	188.742.906,00	100 Persen	216.654.702,00	100 Persen	238.300.372,00	100 Persen	249.810.189,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, penyandang disabilitas dan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri	252 Persen	100 Persen	71.090.540,00	100 Persen	147.490.753,00	100 Persen	178.463.809,00	100 Persen	198.310.189,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pariti Sosial													
				Persentase penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang terlayani	100 Persen	100 Persen	1.400.000,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	0,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persen	100 Persen	71.090.540,00	100 Persen	0,00	100 Persen	2.493.628.170,00	100 Persen	0,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
				Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	212 Orang	212 Orang	79.135.350,00	216 Orang	98.990.331,00	217 Orang	108.889.364,00	218 Orang	119.778.300,00	218 Orang	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
				Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid	9316 Porsen	100 Porsen	1.031.922.226,00	100 Porsen	618.999.860,00	100 Porsen	748.989.831,00	100 Porsen	823.888.814,00	100 Porsen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
				Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha	105 Keluarga	105 Keluarga	294.605.006,00	115 Keluarga	198.000.297,00	145 Keluarga	217.800.327,00	155 Keluarga	239.580.360,00	155 Keluarga	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		
				Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	8995 KK	8995 KK	310.135.430,00	8871 KK	401.499.863,00	8747 KK	441.649.849,00	8623 KK	485.814.834,00	8623 KK	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
				Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	65 Porsen	100 Porsen	114.828.563,00	100 Porsen	494.999.729,00	100 Porsen	596.949.671,00	100 Porsen	658.844.638,00	100 Porsen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota														
				Persentase Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid.	17 Kecamatan	17 Kecamatan	427.181.790,00	17 Kecamatan	279.399.984,00	17 Kecamatan	307.339.982,00	17 Kecamatan	338.073.980,00	17 Kecamatan	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		
				Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat.	200 Orang	200 Orang	114.828.563,00	200 Orang	544.499.701,00	200 Orang	596.949.671,00	200 Orang	658.844.638,00	200 Orang	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah																	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
				Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	61,37 Persen	66,37 Persen	463.040.532,00	71,37 Persen	2.244.732.542,00	76,37 Persen	590.133.051,00	81,37 Persen	649.146.351,00	81,37 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
				Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	77.634.325,00	100 Persen	68.697.623,00	100 Persen	75.567.385,00	100 Persen	83.124.123,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
				Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	13.487.250,00	100 Persen	82.472.500,00	100 Persen	90.719.750,00	100 Persen	99.791.725,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
				Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	218.294.473,00	100 Persen	179.188.592,00	100 Persen	197.107.450,00	100 Persen	216.818.192,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
				Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	77.566.834,00	100 Persen	87.879.000,00	100 Persen	96.666.900,00	100 Persen	106.333.590,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
				Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	76.057.650,00	100 Persen	115.246.879,00	100 Persen	130.071.566,00	100 Persen	143.078.722,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
				Laporan Keuangan Sesuai SAP	1 Dokumen	1 Dokumen	2.810.931.734,00	1 Dokumen	2.900.205.680,00	1 Dokumen	5.638.570.328,00	1 Dokumen	6.202.427.360,00	1 Dokumen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
				Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu, Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Administrasi Kantor	100 Persen	100 Persen	2.810.931.734,00	100 Persen	5.125.973.026,00	100 Persen	5.638.570.328,00	100 Persen	6.202.427.360,00	100 Persen	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA		

Tabel 4.3
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja 2026 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026 (tahun rencana)				Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (tahun n+1)	
			Lokasi	target	Kebutuhan Dana/	Sumber Dana		target	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

				Program /Kegiatan		ian kinerja	pagu indikatif			ian kinerja		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	0	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.335.660.525,00				6.742.087.379,50
1	0	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kualitas pelayanan administrasi Dinas Sosial	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	4.417.036.524,00			100 %	4.858.740.176,40
1	0	0	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	47.741.050,00			100 %	52.515.155,00

1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Marabahan	17	47.741.050,00	Pendapatan Asli Daerah	19	52.515.155,00
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Administrasi Kantor	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	4.132.541.274,00	Pendapatan Asli Daerah	100 %	4.545.795.401,40
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Marabahan	100 %	4.117.036.524,00	Pendapatan Asli Daerah	100 %	4.528.740.176,40
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan	Marabahan	2	15.504.750,00	Pendapatan Asli Daerah	3	17.055.225,00

					Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
1	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	6.000.000,00			100 %	6.600.000,00
1	0	0	2.	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Marabahan	15	6.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		17	6.600.000,00
1	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	134.816.150,00			100 %	148.297.765,00

1	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Marabaha n	3	3.000.000, 00	Penda patan Asli Daerah	4	3.300.000,00	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Marabaha n	11	2.500.000, 00	Penda patan Asli Daerah	12	2.750.000,00	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Marabaha n	531 3	48.450.00 0,00	Penda patan Asli Daerah	584 4	53.295.000,00	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Marabaha n	542 0	40.000.00 0,00	Penda patan Asli Daerah	596 2	44.000.000,00	
1	0	0	2.	0	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Marabaha n	29	40.866.15 0,00	Penda patan Asli Daerah	32	44.952.765,00	
1	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan sarana pelayanan	Kab. Barito Kuala, Semua	100 %	66.903.25 0,00			100 %	73.593.575,00

					Pemerintahan Daerah	administrasi kantor	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa						
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Marabahan	5	25.129.600,00	Pendapatan Asli Daerah		6	27.642.560,00
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Marabahan	12	30.008.850,00	Pendapatan Asli Daerah		13	33.009.735,00
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Marabahan	2	11.764.800,00	Pendapatan Asli Daerah		3	12.941.280,00
1	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	29.034.800,00			100 %	31.938.280,00

1	061	09	20	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Marabahan	28	8.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah	30	8.800.000,00
1	061	09	20	09	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Marabahan	1	16.534.800,00	Pendapatan Asli Daerah	2	18.188.280,00
1	061	09	20	10	Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	Marabahan	1	4.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah	2	4.950.000,00
1	062				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan keluarga miskin dan Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mandiri	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	239.580.360,00		100 %	131.219.198,00

1	0	0	2.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	100 %	119.290.1 80,00			100 %	131.219.198,00
1	0	0	2.	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Marabaha n	90	119.290.1 80,00	Penda patan Asli Daerah		99	131.219.198,00
1	0	0	4.	03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Pengembang an Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/K ota	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	100 %	119.790.1 80,00			100 %	131.769.198,00
1	0	0	4.	0	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Marabaha n	90	119.790.1 80,00	Penda patan Asli Daerah		99	131.769.198,00

					Pemberdayaan Ekonomi								
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	500.000,00			100 %	550.000,00
1	06	02	2.02	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Marabahan	20	500.000,00	Pendapatan Asli Daerah		22	550.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, penyandang disabilitas,	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua	100 %	196.310.189,00			100 %	121.121.207,90

						anak terlantar dan penyandang penyakit sosial (esknarapidana,narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Kelurahan/Desa						
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	- Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase penyandang penyakit sosial (eks	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	192.310.189,00			100 %	116.721.207,90

						narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang terlayani							
1	0	0	2.	0	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota (Rumah Singgah)	Marabaha n	17	-	Penda patan Asli Daerah		-	-
1	0	0	2.	0	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	Marabaha n	17	90.200.00 0,00	Penda patan Asli Daerah		19	99.220.000,00

						Kewenangan Kabupaten							
1	064014	004014	2.014	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten	Marabahan	12	1.610.189,00		Pendapatan Asli Daerah	13	1.771.207,90
1	064016	004016	2.016	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis, dan masyarakat kewenangan Kabupaten	Marabahan	206	100.500.000,00		Pendapatan Asli Daerah	227	110.550.000,00
1	06402	00402	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase anak panti yang terdaftar dan mendapatkan pelayanan	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua	100 %	4.000.000,00			100 %	4.400.000,00

					Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Keluraha n/Desa						
1	0	0	2.	0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten	Marabaha n	17	4.000.000, 00	Penda patan Asli Daerah		19	4.400.000,00
1	0	0			PROGRAM PERLINDUN GAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya capaian data Rumah Tangga Miskin (RTM) yang telah diupdate dan Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n/Desa	100 %	823.888.8 14,00			100 %	906.277.695,40

1	06502	2.			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya - Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha - Persentase Kecamatan yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	823.888.814,00			100 %	906.277.695,40
1	06502	2.	0	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten	Marabahan	7350	411.944.407,00	Pendapatan Asli Daerah		8085	453.138.847,70
1	06502	2.	0	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial	Marabahan	40	411.944.407,00	Pendapatan Asli Daerah		44	453.138.847,70

						kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten							
1	0	0			PROGRAM PENANGANA N BENCANA	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	658.844.638,00			100 %	724.729.101,80
1	0	0	2.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	658.844.638,00			100 %	724.729.101,80
1	0	0	2.	0	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 kali 1 dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten	Marabahan	200	658.844.638,00	Pendapatan Asli Daerah		220	724.729.101,80

Tabel 4.4

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR DPA-BELANJA SKPD						
KAB. BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
SKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA													
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan													
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA								Rp11.645.020.620,00	Rp57.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.702.020.620,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp11.645.020.620,00	Rp57.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.702.020.620,00	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			Rp11.645.020.620,00	Rp57.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.702.020.620,00	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp5.189.867.835,00	Rp57.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.246.867.835,00	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp94.457.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.457.800,00	
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp94.457.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.457.800,00	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp4.157.035.774,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.157.035.774,00	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.117.036.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.117.036.524,00	
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp39.999.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.999.250,00	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp80.965.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.965.500,00	
1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp80.965.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.965.500,00	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp518.841.681,00	Rp57.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp575.841.681,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.498.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.498.000,00		
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp130.438.985,00	Rp57.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.438.985,00		
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp88.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.280.000,00		
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp37.792.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.792.350,00		
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp254.832.346,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.832.346,00		
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp78.822.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.822.280,00		
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp28.729.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.729.600,00		
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp31.008.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.008.850,00		
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp19.083.830,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.083.830,00		
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp259.744.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp259.744.800,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
								T-1	Tahun					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp71.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.780.000,00	
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp138.034.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.034.800,00	
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp49.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.930.000,00	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Rp1.844.151.982,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.844.151.982,00	
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp9.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.900.000,00	
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.900.000,00	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.834.251.982,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.834.251.982,00	
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.834.251.982,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.834.251.982,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Rp3.046.524.181,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.046.524.181,00	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Rp373.785.506,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp373.785.506,00	
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp177.032.861,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.032.861,00	
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp187.752.645,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.752.645,00	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			Rp2.672.738.675,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.672.738.675,00	
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.756.675,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.756.675,00	
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.666.982.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.666.982.000,00	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Rp1.293.823.235,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.293.823.235,00	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.293.823.235,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.293.823.235,00	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp444.068.235,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp444.068.235,00	
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp849.755.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp849.755.000,00	
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Rp270.653.387,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp270.653.387,00	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			Rp270.653.387,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp270.653.387,00	
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan		Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp270.653.387,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp270.653.387,00	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala periode 2023-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kuala untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan penjabaran Renstra Periode 2023-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan dinas, ketatalaksanaan, SDM, anggaran dan komitmen seluruh jajaran ASN yang ada. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2023-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, jika diperlukan, dapat dilakukan perubahab/revisi muatan Renstra, termasuk indikator kinerja yang ada dalamnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Periode 2023-2026. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Periode 2023-2026 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito kuala pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2023 2026. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 akan menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang akan disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Barito Kuala pada setiap tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

5.2 Saran

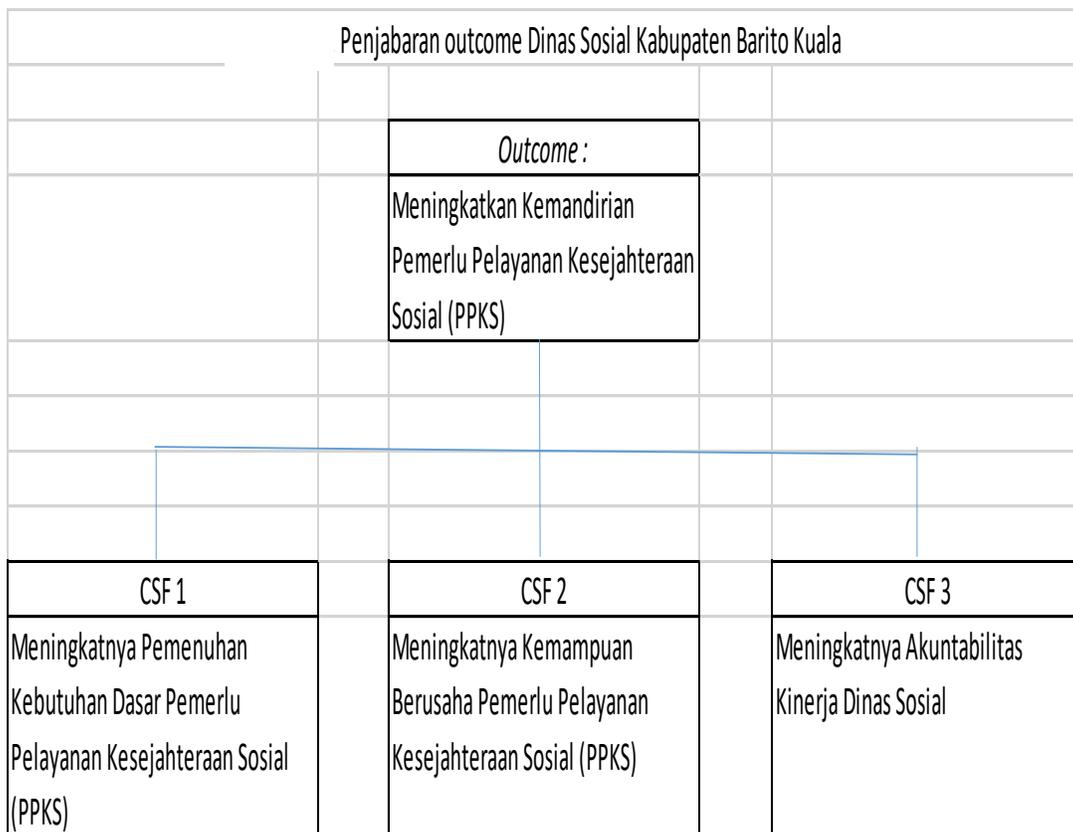
1. Seluruh Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Pelaksana Kegiatan, BAPPELITBANG menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Page 42 DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA Tahun 2026. Hasil evaluasi, kajian dan analisis tersebut menjadi dasar bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun berikutnya.
2. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Pelaksana Kegiatan harus menyusun dan membuat Rancangan awal RENJA masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2026.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat diakomodir secara baik.

LAMPIRAN

Daftar CSF dan Kondisi yang diperlukan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

CSF	Kondisi Yang Diperlukan
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Penjabaran outcome Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala



Jabaran CSF ke Kondisi antara yang diperlukan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

CSF	Kondisi antara yang diperlukan
1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Meningkatnya Perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin
	2. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bantuan sesuai DTKS.
	3. Meningkatnya Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana
	4. Meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar
	5. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia
	6. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang Disabilitas
	7. Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
2. Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Meningkatnya pemberdayaan keluarga miskin
	2. Meningkatnya penyandang disabilitas yang mempunyai pekerjaan tetap
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	1. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja
	2. Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja
	3. Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja
	4. Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal
	5. Meningkatnya capaian atas perjanjian kinerja individu

**CASCADING
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA**

Kepala Dinas Sosial

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Indikator Kinerja Utama

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha
3. Nilai SAKIP Dinsos

Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial

Kabid Rehabilitasi Sosial

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kinerja Utama:

1. Meningkatnya pemberdayaan keluarga miskin

Indikator Kinerja :

1. Persentase kelompok keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha
2. Persentase keluarga miskin perorangan yang berhasil mengembangkan usaha

Kinerja Utama:

1. Meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar
2. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia
3. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang Disabilitas
4. Meningkatnya pelayanan sosial bagi penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
5. Meningkatnya penyandang disabilitas yang mempunyai pekerjaan tetap

Indikator Kinerja :

1. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
2. Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
3. Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
4. Persentase penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
5. Persentase penyandang disabilitas yang mempunyai pekerjaan tetap

Kinerja Utama:

1. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi keluarga Miskin
2. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bantuan sosial DTKS
3. Meningkatnya Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana

Indikator Kinerja :

1. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima bantuan
3. Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat
- 4.

Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Kinerja Utama:

1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi keluarga miskin
2. Terlaksananya fasilitasi pemenuhan kebutuhan rumah tangga keluarga miskin

Indikator Kinerja :

1. Jumlah orang UEP-P dan UEP KUBE
2. Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan rumah tangga KUBE
3. Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan peralatan rumah tangga

Kasi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Kinerja Utama:

1. Terlaksananya pembinaan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2. Terlaksananya asiliasi pengembangan nilai kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan

Indikator Kinerja :

1. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS dan Karang Taruna) yang dibina
2. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina
3. Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima bantuan sosial
4. Jumlah hari keperintisan/kepahlawanan yang diperingati

Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Nafza

Kinerja Utama:

1. Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja bagi anak terlantar
2. Terlaksananya Pelayanan Sosial orang tua dan Anak Terlantar
3. Terlaksananya fasilitasi penanganan eks penyandang penyakit sosial (Eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Indikator Kinerja :

1. Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan kerja
2. Jumlah orang tua yang mendapat pelayanan sosial terhadap kekerasan seksual, fisik, emosional dan ekonomi pada anak
3. Jumlah anak yang mendapat pelayanan sosial terhadap kekerasan seksual, fisik, emosional dan ekonomi pada anak
4. Jumlah orang terlantar, eks narapidana dan penyandang penyakit sosial lainnya yang diberi bantuan

Kasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

Kinerja Utama:

1. Terlaksananya pelayanan sosial, bantuan dan fasilitasi bagi lanjut usia
2. Terlaksananya pelayanan sosial, bantuan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas

Indikator Kinerja :

1. Jumlah lansia potensial yang menerima bantuan stimulan usaha (Pengungsian)
2. Jumlah lansia yang menerima bantuan bedah rumah
3. Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima bantuan sosial
4. Jumlah terkirimnya penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan kerja berbasis panti
5. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan stimulan usaha

Kasi Perlindungan Sosial dan Bencana

Kinerja Utama:

1. Terpenuhinya orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 dalam masa tanggap darurat (Pengungsian)
2. Terpenuhinya orang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan TAGANA

Indikator Kinerja :

1. Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 kali 1 dalam masa tanggap darurat (pengungsian)
2. Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan TAGANA

Kasi Jaminan Sosial Keluarga

Kinerja Utama:

1. Terlaksananya pelayanan jaminan sosial keluarga miskin
2. Terlaksananya Pemutakhiran Data PPKS

Indikator Kinerja :

1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan jaminan/perindungan sosial
2. Jumlah keluarga rawan sosial ekonomi yang menerima bantuan stimulan usaha
3. Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

